



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
TRANSFER TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016-2020**

Skripsi

Dibuat oleh:  
Euis Tilis Tianawati  
0221 18 277

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**NOVEMBER 2022**



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
TRANSFER TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN  
2016-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
TRANSFER TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016-2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022

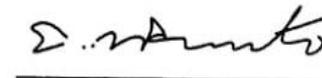
Euis Tilis Tianawati  
0221 18 277

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang  
(Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA., PIA)



Ketua Komisi Pembimbing  
(Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak.,  
CFE., CFA., CA., QIA., CGCAE., ASEAN CPA.,  
CIAE)



Anggota Komisi Pembimbing  
(Sigit Edy Surono, Drs., MM)



---

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Euis Tilis Tianawati

NPM : 022118277

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Peran, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, September 2022



Euis Tilis Tianawati  
022118277

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun  
2023**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## **ABSTRAK**

EUIS TILIS TIANAWATI 022118277. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020. Dibawah bimbingan : Dr. ERNADHI SUDARMANTO, Ak., M.M., M.Ak., CFE., CFrA., CA., QIA., CGCAE., ASEAN CPA. dan SIGIT EDY SURONO, Drs., MM. 2022.

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer merupakan indikator Pendapatan Daerah yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi juga tingkat kemungkinan daerah dalam membiayai pembiayaan daerahnya. Sebaliknya semakin tinggi tingkat realisasi Dana Transfer maka semakin tinggi juga tingkat ketergantungan suatu daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan metode analisa data yaitu Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, dan Uji Hipotesis dengan melihat pengaruh ketiga variabel.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara persial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Transfer secara persial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

***Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Kinerja Keuangan***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang dipanjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020”**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk sebagai salah satu syarat kelulusan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor. Dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam memberi saran, dukungan, serta rasa semangat dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, ayah Kaman dan ibu Imas Setiawati yang selalu memberikan dukungan baik moral dan materi, serta dukungan, semangat dan doa sehingga saya bisa berada di tingkat ini.
2. Kakak tercinta, Kiki Kamastianti yang senantiasa menjadi wali saya selama menempuh jenjang pendidikan dan membantu dalam memberikan dukungan dan rasa semangat kepada saya hingga saat saya berada ditingkat ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM., CAP. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Ibu Enok Rusmanah, S.E., M.Acc. Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Bapak Dr. H. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP., CTCP., C.F.A. CNPHRP., CAP. selaku Asisten Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
9. Bapak Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE., CFrA., CA., QIA., CGCAE., ASEAN CPA., CIAE. Selaku Ketua Komisi yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat dalam penyusunan proposal penelitian ini.
10. Bapak Sigit Edy Surono, Drs., M.M. Selaku Anggota Komisi yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat dalam penyusunan proposal penelitian ini.

11. Seluruh Dosen dan Staff di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
12. Dita dan Wanda Sahabat saya yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat selama penyusunan penelitian ini.
13. Nadia, Evi, Reni, Nelly, Ela, dan Chae Sahabat kampus yang telah banyak memberikan saran, dukungan dan semangat selama penyusunan penelitian ini.
14. Muslim yang telah banyak memberikan saran, dukungan dan semangat selama penyusunan penelitian ini.
15. NCT, terkhusus Lee Haechan (FullSun) yang telah memberikan semangat di setiap harinya selama penyusunan penelitian ini.
16. Semua teman-teman kelas D Akuntansi dan Organisasi HMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2018 yang telah banyak memberikan banyak pengalaman.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari dan meminta maaf apabila skripsi yang telah dibuat masih belum sempurna karna masih memiliki kekurangan baik dari bahan ataupun penulisan. Semoga dibuatnya skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk penulis maupun untuk pembaca. Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, September 2022

Penulis  
Euis Tilis Tianawati

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA .....	iv
LEMBAR HAK CIPTA.....	v
ABSTRAK .....	vi
PRAKATA .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	9
1.3.1 Maksud Penelitian.....	9
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian .....	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Akuntansi Sektor Publik .....	11
2.3.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.3.1 Tujuan Akuntansi Sektor Publik .....	11
2.3.1 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik.....	12
2.3.1 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.....	12
2.2 Otonomi Daerah .....	12

2.3	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	13
2.3.1	Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	13
2.3.2	Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	13
2.4	Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	14
2.5	Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	15
2.5.1	Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	15
2.5.2	Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.6	Dana Transfer/Perimbangan.....	18
2.7	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran .....	20
2.7.1	Penelitian Sebelumnya .....	20
2.7.2	Kerangka Pemikiran.....	29
2.8	Hipotesis Penelitian .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>30</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	30
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	30
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	30
3.4	Operasional Variabel .....	30
3.5	Metode Penarikan Sampel.....	31
3.6	Metode Pengumpulan Data .....	31
3.7	Metode Pengolahan Data/Analisis Data.....	32
3.7.1	Statistik Deskriptif .....	32
3.7.2	Uji Asumsi Klasik .....	32
3.7.3	Analisis Regresi Linier Berganda .....	33
3.7.4	Uji Hipotesis .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN .....</b>		<b>35</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
4.1.1	Sejarah Singkat Kabupaten Bogor .....	35
4.1.2	Visi dan Misi Kabupaten Bogor.....	36
4.1.3	Geografis Kabupaten Bogor .....	36
4.1.4	Pemerintah Kabupaten .....	37
4.1.6	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Bogor .....	41
4.2	Analisis Data .....	47

4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	47
4.2.2	Uji Asumsi Klasik .....	48
4.2.3	Analisis Regresi Linier Berganda .....	52
4.2.4	Uji Hipotesis .....	54
4.3	Pembahasan Dan Interpretasi Hasil Penelitian .....	56
4.3.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bogor .....	56
4.3.2	Pengaruh Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bogor .....	57
4.3.3	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bogor .....	57
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>59</b>
5.1	Simpulan .....	59
5.2	Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>64</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>		<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan PAD Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 .....	5
Tabel 1.2 Perkembangan Dana Transfer Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 .....	5
Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	15
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3.1 Operasional Variabel .....	31
Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016-2020 .....	43
Tabel 4.2 Perkembangan PAD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016-2020 .....	44
Tabel 4.3 Dana Transfer Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016-2020 .....	44
Tabel 4.4 Hasil Pengukuran Dana Transfer Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016-2020 .....	44
Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016-2020 .....	46
Tabel 4.6 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	47
Tabel 4.7 Analisis Statistik Deskriptif .....	48
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov Smirnov .....	50
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolonieritas .....	51
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi .....	51
Tabel 4.11 Uji Koefisien Regresi Linier Berganda .....	53
Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik t Persial .....	54
Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik f Simultan .....	55
Tabel 4.16 Hasil Koefisien Determinasi .....	56

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Pada Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020.....	6
Gambar 1.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020.....	8
Gambar 2.1 Diagram Kerangka Pemikiran .....	29
Gambar 4.1 Struktur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 .....	38
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Plot .....	49
Gambar 4.2 Pola Titik-Titik Scatterplot.....	52

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 .....	65
Lampiran 2 Tabel t.....	66
Lampiran 3 Tabel F.....	67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi yang terdiri dari berbagai macam daerah, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan dan desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki pemerintahan yang diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat sebagai perwujudan otonomi daerah. Pelaksanaan daerah otonomi diyakini merupakan cara terbaik untuk meningkatkan pembangunan daerah, menggantikan sistem pembangunan terpusat yang dinilai kurang bisa meningkatkan pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan pembangunan masing-masing daerah. Konsekuensinya dalam melaksanakan otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan tertib, transparansi, dan akuntabel. Dengan otonomi daerah, pemerintah juga diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam pengelolaan keuangan maupun hal pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Kinerja Keuangan merupakan bagian suatu ukuran yang bisa dipergunakan dalam mengawasi kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan juga benar.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam APBD yang setiap tahunnya ditetapkan oleh peraturan daerah yaitu PP no. 12 Tahun 2019.

APBD merupakan dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Tahun 2016. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efektif, dan efisien atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, suatu daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Dengan diharapkan pemerintah daerah dapat mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pembiayaan pemerintah di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber dana bagi daerah dalam aktifitas operasional pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah tersebut. Pendapatan Asli daerah juga merupakan sumber utama dari pembiayaan dan juga pengeluaran daerah. Oleh karena itu, daerah harus dapat menggali dan mengidentifikasi sumber daya daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kontribusi pendapatan asli daerah semakin besar terhadap struktur APBD, maka semakin kecil juga ketergantungan daerah kepada pemerintahan pusat dan dapat menunjukkan kemandirian daerah tersebut.

Selain Pendapatan Asli daerah, penerimaan daerah juga dapat berasal dari dana Transfer/Dana Perimbangan yang merupakan juga sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi juga terhadap struktur APBD. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang nantinya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Dana perimbangan atau disebut juga dengan Transfer mempunyai peranan penting untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan pelayanan publik. Dana Transfer akan membuat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menurun karena Dana Transfer mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk kebutuhan daerahnya. Dana Transfer yang akan diteliti dalam penelitian ini terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Kemampuan penyelenggaraan keuangan dalam suatu pemerintah merupakan hal penting. Karena pemerintah daerah tidak akan mampu melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien karena tanpa biaya yang cukup pemerintah daerah tidak akan dapat memenuhi pelayanan pembangunan dan keuangan ilmiah yang merupakan salah satu kriteria dasar yang memberitahukan secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah tersebut dalam melaksanakan otonomi daerah masing-masing. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah yang berupa perhitungan APBD (Halim, 2012).

Pengukuran kinerja keuangan merupakan komponen sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan hanya sekedar untuk menunjukkan bagaimana kemampuan uang publik dibelanjakan, tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan dengan baik secara efisien yang berarti penggunaan dana tersebut dapat memberikan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan dana tersebut dapat mencapai tujuan atau target untuk memenuhi kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2018).

Penilaian Kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD. Hasil dari perhitungan analisis rasio yang dilakukan APBD, selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman pengukuran untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan. Pemerintah daerah diberikan tugas untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan.

Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah Analisis Surplus/Defisit, Derajat Desentralisasi Fiskal, Derajat Otonomi Fiskal, Upaya Fiskal/Posisi Fiskal, Analisis Efektivitas, Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, dan Kemampuan Pinjaman Daerah. Analisis Surplus/Defisit digunakan untuk memantau kebijakan fiskal dipemerintahan daerah. Derajat Desentralisasi Fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel seperti PAD terhadap total penerimaan daerah atau rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Daerah (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Derajat Otonomi Fiskal yaitu Kemandirian Daerah adalah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2004). Upaya Fiskal/Posisi Fiskal yaitu usaha pajak yang dapat diartikan sebagai ratio antar penerima pajak dengan kapasitas membayar disuatu daerah. Analisis Efektivitas yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasi PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, (Halim, 2004). Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk mengetahui jenis pajak/retribusi daerah termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Rasio Kemandirian daerah digunakan untuk mengukur pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah. Kemampuan Pinjaman Daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam mendapatkan uang atau manfaat dari pihak lain yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik dengan konsekuensi harus mengembalikannya dalam waktu tertentu. Dalam penelitian penulis akan menggunakan rasio kemandirian daerah dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bogor. Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Alasan memilih Kabupaten Bogor karena ingin mengetahui seberapa jauh pelaksanaan dan kemampuan kinerja keuangan daerahnya dalam mengelola keuangan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai dengan mandiri kegiatan pemerintahannya.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia dengan jumlah penduduknya 5.427.068 (2021) dengan luas 2.986 km. Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang (Banten), Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi Utara: Kabupaten Karawang di timur, Kabupaten Cianjur di tenggara, Kabupaten Sukabumi di selatan, serta Kabupaten Lebak (Banten) di barat. Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan, yang terbagi atas desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong, yang berada di sebelah utara Kota Bogor.

Tabel 1.1  
Perkembangan PAD Kabupaten Bogor  
Tahun 2016-2020

Tahun	PAD	%	Kenaikan dan Penurunan
2016	2.292.175.674.801,00	38,37%	-
2017	3.041.872.447.905,35	43,61%	5,24%
2018	2.794.660.740.152,18	38,28%	-5,33%
2019	3.161.165.915.498,00	38,84%	0,56%
2020	2.810.155.352.282,00	36,56%	-2,28%

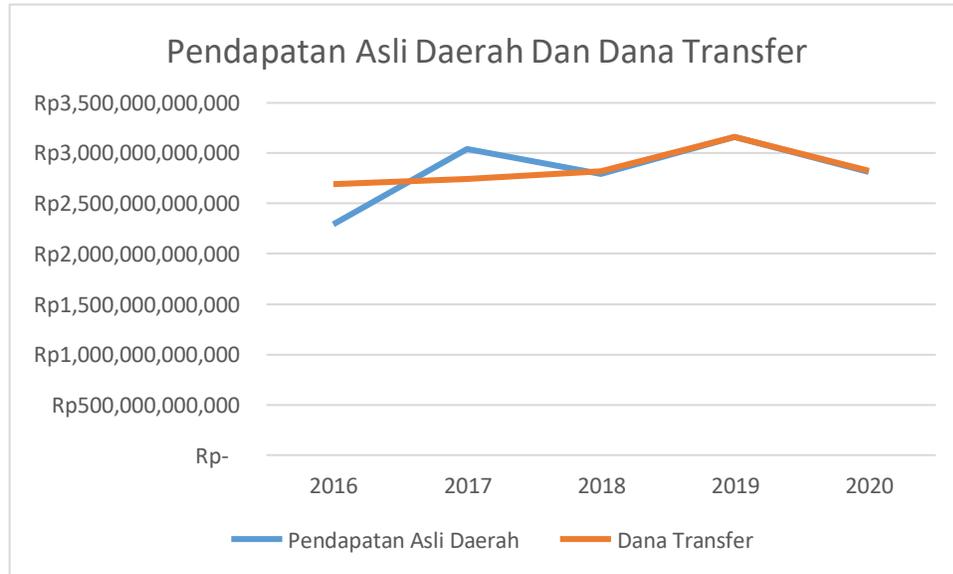
Sumber : [www.bogorkab.go.id](http://www.bogorkab.go.id) (diolah, 2022)

Tabel 1.2  
Perkembangan Dana Transfer Kabupaten Bogor  
Tahun 2016-2020

Tahun	Dana Transfer/Dana Perimbangan	%	Kenaikan dan Penurunan
2016	2.692.167.023.139,00	45,07%	-
2017	2.742.839.370.823,00	39,32%	-5,75%
2018	2.818.814.498.138,00	38,61%	-0,71%
2019	3.094.445.817.299,00	38,84%	0,23
2020	2.825.931.289.983,00	36,76%	-2,08

Sumber : [www.bogorkab.go.id](http://www.bogorkab.go.id) (diolah, 2022)

**Gambar 1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer**  
**Pada Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020**



Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa :

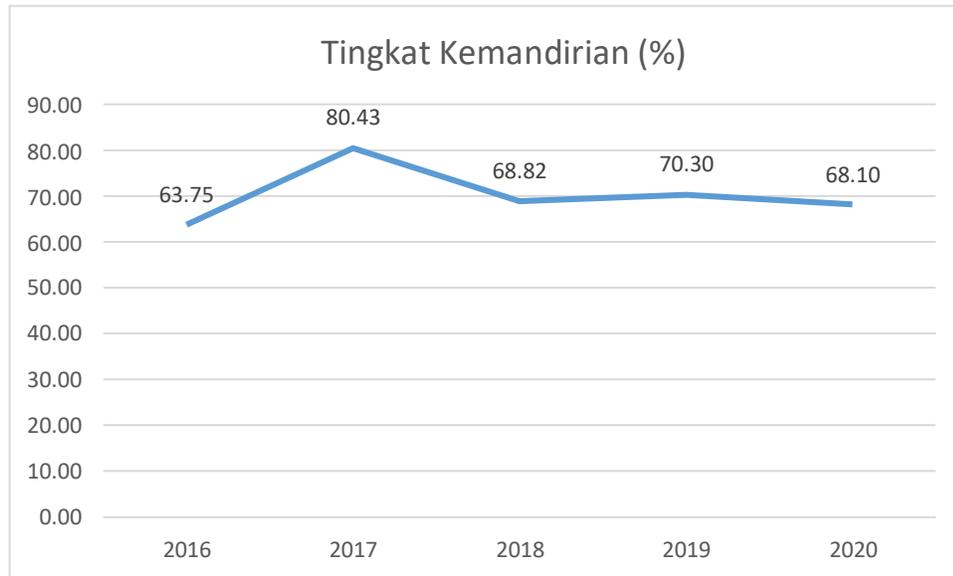
Dalam periode tahun 2016-2020, pada tabel diatas dapat dilihat persentase kenaikan PAD dan Dana Transfer mengalami perubahan setiap tahunnya. Apabila dilihat lebih teliti, PAD pada tahun 2016 mencapai 38,37% dan Dana Transfer mencapai 45,07%. Pada tahun 2017 PAD mencapai 43,61% dan Dana Transfer mencapai 39,32%. Namun pada tahun 2018 PAD mengalami penurunan menjadi 38,38% dan Dana Transfer meningkat menjadi 38,61%. Pada tahun 2019 PAD mengalami kenaikan menjadi 38,84% dan Dana Transfer mengalami kenaikan menjadi 38,84%. Pada tahun 2020 PAD mengalami penurunan menjadi 36,56% dan Dana Transfer menurun hingga mencapai 36,76%.

Hal ini dapat menunjukkan ketidak konsistenan dan mengalami fluktuasi antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer/Dana Perimbangan terutama Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah pun menurun dikarenakan hasil pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak tempat wisata yang ikut menurun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya dilakukan dirumah dan Dana Transfer jauh lebih tinggi dibandingkan PAD maka akan mencerminkan bahwa rendahnya kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber PAD, semakin tinggi dana transfer dari pemerintah pusat maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 kemandirian daerah menurun mencapai angka 68,10%. Pada tahun 2016 sebesar 63,75%, 2017

mengalami kenaikan menjadi 80,43%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 68,82%. Tahun 2019 sebesar 70,30%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 68,10%.

Gambar 1.2  
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  
Kabupaten Bogor 2016-2020



Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bogor dari tahun ketahun mengalami penurunan dan kenaikan atau fluktuasi. Semakin tinggi rasio kemandirian maka menggambarkan pula semakin tinggi kemandirian pemerintah dalam mengelola daerahnya. Sebaliknya semakin rendah tingkat kemandirian maka menunjukkan bahwa kemandirian suatu daerah menurun.

Dalam menjalankan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Karena bawasannya semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, maka daerah tersebut dapat menjalankan atau memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya. Oleh karena itu, perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah (Mahmudi, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri Yuni Pratiwi (2018) yaitu Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016, menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Verawati, Ade Kemala Jaya, Intan Puspanita, dan Nurhidayah (2020), yang berjudul Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan, menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Dana Bagi Hasil tidak mempengaruhi Kinerja Keuangan.

Menurut Ni Kadek Novia Indrawati Putrid an Ni Putu Ayu Darmayanti (2019), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali, menunjukkan hasil Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali.

Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yoshinta Endah Wahyuningsih (2016) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan Dana Perimbangan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fisa Aprilia Muhayanah (2016), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah, Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020**”.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dalam penjelasan pada latar belakang, menunjukkan bahwa dam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer mempunyai proporsi menaik dan menurun setiap tahunnya. sehingga Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer mengalami fluktuasi dan ketidak konsistenan. Hal ini juga disebabkan juga oleh adanya Pandemi

Covid-19 yang menjadikan Pendapatan Asli Daerahnya menurun. Hal ini akan berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk periode anggaran tahun 2016-2020.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, penyusun mengidentifikasi masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2016-2020?
2. Apakah Dana Transfer berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2016-2020?
3. Apakah PAD dan Dana Transfer secara bersama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2016-2020?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dengan cara mengetahui pengaruh pada variabel-variabel penelitian dan menyimpulkan hasil dari penelitian, serta memberikan saran untuk permasalahan yang timbul, dengan cara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk periode anggaran tahun 2016-2020.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada periode tahun anggaran 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Transfer terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada periode tahun anggaran 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh PAD dan Dana Transfer secara bersama Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada periode tahun anggaran 2016-2020.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan memiliki kegunaan/manfaat sebagai berikut :

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

- Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk penulis mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer dan

mengembangkan ilmu mengenai Akuntansi Sektor Publik khususnya mengenai kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD dan Dana Transfer dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

- **Bagi Pembaca**

Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai sarana informasi dan menambah pengetahuan khususnya mengenai akuntansi sektor publik serta menjadikan acuan untuk penelitian selanjutnya sebagai mengembangkan menjadi ilmu pengetahuan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan kepada pemerintah daerah kabupaten bogor sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam pengalokasian sumber penerimaan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi Sektor Publik**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Sektor Publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba).

Sektor publik akuntansi sering diartikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yaitu teknik dan analisis akuntansi yang digunakan pada organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik.

Menurut Indra Bastian (2010) menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga- lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan social, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Menurut Halim (2014) menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas dasar alternative arah tindakan.

Menurut Mardiasmo (2015) menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Jadi dapat disimpulkan Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengumpulan, analisis, pengklasifikasian, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

##### **2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik**

Berdasarkan American Accounting Association (AAA) 1970 dalam Glynn 1993, berikut ini tujuan dari akuntansi dalam sektor publik :

1. Kontrol Manajemen

Kontrol Manajemen berguna untuk memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan organisasi secara efisien, cepat, tepat dan ekonomis atas operasional hingga menggunakan sumber daya yang dialokasikan dalam suatu organisasi.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi manajer sektor publik. Akuntabilitas digunakan dalam pelaporan pelaksanaan tanggung jawab atas sumber daya atau bidang/divisi yang ada didalam wewenang manajer tersebut.

### 2.1.3 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Ruang lingkup Akuntansi Sektor Publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi serta organisasi-organisasi publik nonprofit. Proses pelaporan dan pertanggung jawaban kepada masyarakat di atur dalam suatu kerangka standar akuntansi sektor publik. Berikut ini bidang utama dari Akuntansi Sektor Publik :

1. Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Akuntansi Pemerintah Daerah
3. Akuntansi Partai Politik
4. Akuntansi LSM
5. Akuntansi Yayasan
6. Akuntansi Pendidikan : sekolah atau perguruan tinggi
7. Akuntansi Kesehatan : puskesmas atau rumah sakit
8. Akuntansi Tempat Peribadatan : masjid, gereja, wihara atau pura

### 2.1.4 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktifitas yang memiliki tujuan (purposive activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan karakteristik akuntansi disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

## 2.2 Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban otonomi daerah untuk melaksanakan atau mengatur sendiri urusan pemerintahannya masing masing daerah dan melaksanakan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dalam menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang,

dan kewajiban sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan bagian utama dari tujuan pemerintah.

## **2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Mahsun (2013) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian dalam pengelolaan keuangan daerah atas pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah. Menurut Halim (2014) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Mahmudi (2014), Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu perencanaan yang dituangkan dalam APBD, yang meliputi anggaran dan realisasi.

Adapun pendapat lain menurut Hendro (2010) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil dari suatu kegiatan atau program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang telah terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil penilaian secara kuantitatif dari suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pemerintah daerah. Kinerja Keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat seberapa jauh entitas telah menjalankan tujuan entitas dengan menggunakan aturan menjalankan keuangan secara dengan baik dan benar.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari pengukuran pencapaian pengelolaan keuangan daerah dalam menjalankan suatu kegiatan atau program untuk mencapai tujuan pemerintah daerah.

### **2.3.2 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Indikator kinerja merupakan ukuran dari kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Menurut Mahsun (2017) menyatakan bahwa Pengukuran kinerja keuangan pemerintahan daerah harus mencakupi pengukuran kinerja keuangan. Hal ini berkaitan dengan tujuan organisasi pemerintah daerah. Indikator kinerja mengacu pada penilaian yang secara tidak langsung yaitu hal-hal yang bersifat hanya indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian secara langsung. Indikator dan ukuran kinerja sangat penting untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan strategi.

Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berikut ini :

1) Indikator Masukan (Inputs)

Indikator Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalkan : dana anggaran, informasi, sumber daya manusia dan daerah, dan sebagainya.

2) Indikator Keluaran (Outputs)

Indikator Keluaran (Outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik.

3) Indikator Hasil (Outcomes)

Indikator Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

4) Indikator Manfaat (Benefits)

Indikator Manfaat (Benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5) Indikator Dampak (Impacts)

Indikator Dampak (Impacts) adalah pengaruh yang di timbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

#### **2.4 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Mahsun (2013) menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Menurut Whittaker (2012) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Penilaian kinerja keuangan diukur berdasarkan anggaran yang telah ditentukan.

Menurut Mahsun (2016) menyatakan bahwa Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Menurut Mardiasmo (2016) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu :

1) Memperbaiki kinerja pemerintah daerah

- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menggunakan analisis rasio untuk pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). dari hasil analisis rasio dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah dalam upaya mengukur/menggali sumber pendapatan asli daerah. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan Rasio Kemandirian sebagai indikator mengukur kinerja keuangan. Rasio Kemandirian keuangan daerah dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.1  
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0 %-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

## 2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### 2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil Pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Darise (2018) menyatakan bahwa, Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat

sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat terlaksanakan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan digali dari pendapatan yang berasal dari suatu daerah itu sendiri yang dikelola oleh masing-masing daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan/pelayanan masyarakat.

Pada dasarnya upaya Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah adalah dilakukan dengan tiga cara antara lain :

1) Intensifikasi

Intensifikasi adalah suatu upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). Diintensifkan adalah dalam arti operasional pemungutannya.

2) Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.

3) Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Merupakan hal yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap Negara, oleh karena itu perlu dikaji lagi pengertian dari wujud pelayanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan atau memenuhi kepuasan masyarakat.

### **2.5.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1) Hasil Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Daerah :

- a) Pajak Daerah Provinsi :
  - 1. Pajak Kendaraan Bermotor
  - 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan Air
- b) Pajak Daerah Kabupaten :
  - 1. Pajak Hotel dan Restoran
  - 2. Pajak Reklame
  - 3. Pajak Hiburan
  - 4. Pajak Penerangan Jalan
  - 5. Pajak Penggalian dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
  - 6. Pajak Parkir
  - 7. Pajak Air Tanah
  - 8. Pajak Sarang Burung Wallow
  - 9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
  - 10. Bea Perolehan Hak atau Tanah dan Bangunan

2) Hasil Restribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 Tahun 2009).

Retribusi Daerah :

- a) Retribusi Jasa Umum :
    - 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
    - 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersih
    - 3. Retribusi Pelayanan Pasar
    - 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - b) Retribusi Jasa Usaha :
    - 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
    - 2. Retribusi Tempat Pelelangan
    - 3. Retribusi Terminal
    - 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  - c) Retribusi Perizinan Tertentu:
    - 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
    - 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
    - 3. Retribusi Izin Gangguan
    - 4. Retribusi Trayek
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-Lain PAD Yang Sah :

Pendapatan Daerah yang berasal dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu:

- a) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
- b) Jasa Giro
- c) Pendapatan Bunga
- d) Tuntutan Ganti Rugi
- e) Komisi
- f) Potongan
- g) Keuntungan Selisih Kurs
- h) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- i) Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi
- j) Pendapatan Hasil Eksekusi atau Jaminan
- k) Pendapatan Atas Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
- l) Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

## **2.6 Dana Transfer/Perimbangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan menyebutkan bahwa dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Djaenuri (2012:100), menyatakan bahwa Dana Transfer/Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Menurut Darise (2018) menyatakan bahwa Dana Transfer/Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Menurut Andirfa (2016) Dana Transfer bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dengan daerah. Secara rata-rata Dana Transfer di daerah lain di Indonesia terhitung 80 persen dari penerimaan daerah. Semakin besar Dana Transfer yang diterima akan memperlihatkan

maka semakin kuat Pemerintah Daerah tergantung pada Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga kinerja keuangan daerah akan menurun.

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dana Transfer atau Dana Perimbangan dibagi terdiri atas sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

1. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2 dan PBB P3), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
2. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

b) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang asal dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi.

c) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang akan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan oleh daerah tertentu.

## 2.7 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.7.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini sebagai berikut ini :

Tabel 2.2  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Yoshinta Endah Wahyuningsih (2016) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2007-2013	Independen: - Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan  Dependen: - Kinerja Keuangan	Kuantitatif	PAD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Perbedaan: - Lokasi penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah  Persamaan: - Variabel: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan - Metode Analisis: Kuantitatif
2	Budianto dan Stanly W Alexsander (2016) Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di	Independen: - Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan  Dependen: Kinerja Keuangan	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja	Perbedaan: - Lokasi Penelitian: Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatra Utara  Persamaan: - Variabel: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan

	Provinsi Sumatera Utara			Keuangan Pemerintah Daerah.	- Metode Analisis: Kuantitatif
3	Tri Yuni Pratiwi (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Dana Perimbangan</li> <li>- Belanja Modal</li> </ul> <p>Dependen:</p> <p>Kinerja Keuangan</p>	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah, Dana Perimbangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.	<p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Penelitian: Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Variabel: Belanja Modal</li> </ul> <p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan</li> <li>- Metode Analisis: Kuantitatif</li> </ul>
4	Desi Istiza, Anis Feblin, dan Yulitiawati (2021) Pengaruh	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	Kuantitatif	Secara persial PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh	<p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Penelitian:</li> </ul>

	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015-2019	- Dana Perimbangan  Dependen:  Kinerja Keuangan		secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan dan secara simultan PAD dan Dana Perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan.	Provinsi Sumatera Selatan  Persamaan:  - Variabel: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan  - Metode Analisis: Kuantitatif
5	Ni Kadek Novia Indrawati Putridan Ni Putu Ayu Darmayanti (2019) Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali	Independen:  - Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan  Dependen:  Kinerja Keuangan	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali.	Perbedaan:  - Lokasi Penelitian: Sarbagita Provinsi Bali  Persamaan:  - Variabel: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan  - Metode Analisis: Kuantitatif
6	Cok Istri Nilam Kencana Ningrat dan Ni Luh Supadmi (2019) Pengaruh Pendapatan Asli	Independen:  - Pendapatan Asli Daerah - Belanja Modal	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja	Perbedaan:  - Lokasi Penelitian: Kabupaten Gianyar.  - Variabel:

	Daerah dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Dependen: Kinerja Keuangan		Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Belanja Modal Persamaan: - Variabel: Pendapatan Asli Daerah - Metode Analisis: Kuantitatif
7	Ade Pipit Fatmawasti dan Oktaviani Cynthia Dewi Pratiwin (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi	Independen: - Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan  Dependen: Kinerja Keuangan	Kuantitatif	PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.	Perbedaan: - Lokasi Penelitian: Kota Cimahi  Persamaan: - Variabel: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan - Metode Analisis: Kuantitatif
8	Putri Puspita Ayu (2018) Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat	Independen: - Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan  Dependen : Kinerja Keuangan	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara persial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Perbedaan: - Lokasi Penelitian: Pemda Se-Jawa Barat  Persamaan: - Variabel: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan

					- Metode Analisis: Kuantitatif
9	Toto Suwarsa, Thayeb Ihsa Sawal (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016-2018	Independen:  - Pendapatan Asli Daerah  - Dana Perimbangan  Dependen:  Kinerja Keuangan	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.	Perbedaan:  - Lokasi Penelitian: Kota Bandung  Persamaan:  - Variabel: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan  - Metode Analisis: Kuantitatif
10	Ester Trivona Nauw, Ikhsan Budi Riharjo (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Independen:  - Pendapatan Asli Daerah  - Dana Perimbangan  - Belanja Modal  Dependen:  Kinerja Keuangan	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat, Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat dan Belanja Modal	Perbedaan :  - Lokasi Penelitian : Papua Barat  - Variabel : Belanja Modal  Persamaan:  - Variabel: Pendaptan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan  - Metode Analisis: Kuantitatif

				berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat.	
11	Fisa Aprilia Muhyannah (2016) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Dana Perimbangan</li> <li>- Belanja Modal</li> </ul> <p>Dependen:</p> <p>Kinerja Keuangan</p>	Kuantitatif	<p>Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah, Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah.</p>	<p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Penelitian: Jawa Tengah</li> <li>- Variabel: Belanja Modal</li> </ul> <p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan</li> <li>- Metode Analisis: Kuantitatif</li> </ul>

12	Swastika Enjang Prasasti (2014) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY Tahun 2007-2013)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Dana Perimbangan</li> </ul> <p>Dependen:</p> <p>Kinerja Keuangan</p>	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, namun secara parsial hanya pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).	<p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Penelitian: Daerah Istimewa Yogyakarta</li> </ul> <p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan</li> <li>- Metode Analisis: Kuantitatif</li> </ul>
13	Joni Fernandes, Annisa Nur Hilwani (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada 19	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Dana Perimbangan</li> </ul> <p>Dependen:</p>	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap	<p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Penelitian: Sumatera Barat</li> </ul> <p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel: Pendapatan Asli Daerah, Dana</li> </ul>

	Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat	Kinerja Keuangan		Kinerja Keuangan.	Perimbangan, dan Kinerja Keuangan - Metode Analisis: Kuantitatif
14	Chrisna dwi heryanti, Dr. Wahidahwati, SE., M.Si., Ak., CA., Dr Bambang Suryono, SE., SH., M.Ak., Ak., CA. (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur	Independen: - Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan - Pertumbuhan Ekonomi  Dependen: Kinerja Keuangan	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan, Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.	Perbedaan: - Lokasi Penelitian: Jawa Timur - Variabel: Pertumbuhan Ekonomi  Persamaan: - Variabel: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan - Metode Analisis: Kuantitatif
15	Verawati, Ade Kemala Jaya, Intan Puspanita, Nurhidayah (2020) Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan	Independen: - Pendapatan Asli Daerah - Dana perimbangan  Dependen: Kinerja Keuangan	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh	Perbedaan: - Lokasi Penelitian: Sumatera Selatan  Persamaan: - Variabel: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan - Metode Analisis: Kuantitatif

				negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Dana Bagi Hasil tidak mempengaruhi Kinerja Keuangan.	
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## 2.8 Kerangka Pemikiran

### a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber/digali dari potensi pendapatan pada suatu daerah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.

Menurut penelitian terdahulu yaitu Tri Yuni Pratiwi (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### b. Pengaruh Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan

Dana Transfer/Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Dana Transfer mempunyai tujuan yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2010) menyatakan bahwa Dana Transfer mempunyai peran utama dalam menjalankan otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam memajukan perkonomian daerah.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desi Istiza, Anis Feblin, dan Yulitiawati (2021) menyatakan bahwa Dana Perimbangan secara persial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### c. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan

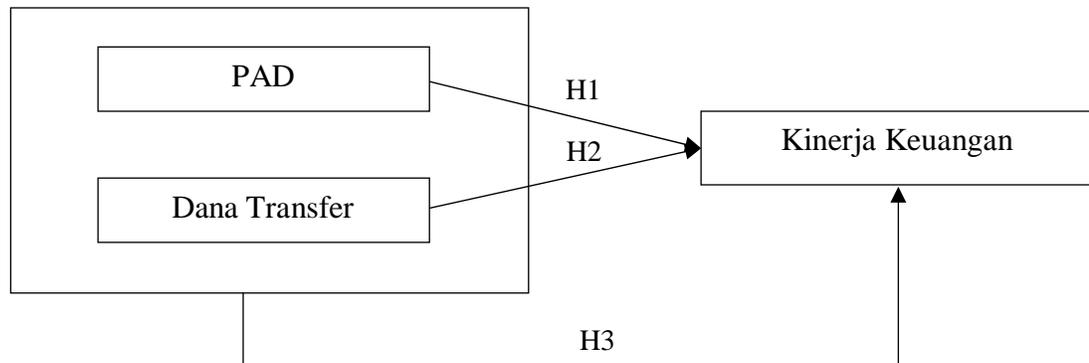
Kinerja Keuanga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama yaitu pendapatan pemerintah daerah yang dialokasikan sebagai sumber pembiayaan pelayanan dan pembangunan di daerah. Ada dua sumber pendapatan yaitu

Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi (Dana Transfer). Semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar dana yang tersedia untuk pelaksanaan pelayanan dan pembangunan daerah kepada masyarakat. Sebaliknya semakin menurun Pendapatan Asli Daerah, Maka akan terhambat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembangunan daerah.

Menurut peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Ade Pipit Fatmawasti dan Oktaviani Cynthia Dewi Pratiwin (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

Gambar 2.1

Diagram Kerangka Pemikiran



## 2.9 Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran penelitian ini akan dirumuskan hipotesis guna memberikan arahan dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor

H<sub>2</sub> = Dana Transfer berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor

H<sub>3</sub> = Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu metode yang bertujuan untuk menjelaskan suatu informasi dengan disertai data statistik, karakteristik dan hubungan antar variabel dengan studi kasus Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer sebagai variabel independen dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu geografis regional. Geografis regional yang diteliti adalah negara, wilayah, atau daerah sehingga data adalah mengenai suatu negara, wilayah atau daerah tertentu. Lokasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016-2020 yang terdapat dalam website [www.bogorkab.go.id](http://www.bogorkab.go.id) dan [www.opendata.bogorkab.go.id](http://www.opendata.bogorkab.go.id) sebagai tinjauan.

#### **3.4 Operasional Variabel**

##### **1. Variabel Independen (Bebas/Tidak Terikat)**

Variabel Independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Menurut Sugiyono (2019:61) menyatakan bahwa, variabel independen adalah variabel-variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer sebagai variabel independen.

##### **2. Variabel Dependen (Variabel Terikat/Tidak Bebas)**

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini menggunakan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan rasio kemandirian sebagai variabel dependen.

Tabel 3.1  
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pendapatan Asli Daerah (Independen/X1)	Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah	$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$	Rasio
Dana Transfer (Independen/X2)	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	$= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Dependen/Y)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Transfer + Pinjaman}} \times 100\%$	Rasio

(Mahmudi, 2011)

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Penarikan Sampel merupakan cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun Anggaran 2016-2020 yang di peroleh dari website resmi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor yaitu [www.bogorkab.go.id](http://www.bogorkab.go.id) dan [www.opendata.bogorkab.go.id](http://www.opendata.bogorkab.go.id).

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data penelitian. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat, membaca dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun Anggaran 2016-2020. Data diperoleh dari website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Untuk melengkapi, memenuhi, dan menyusun dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi tambahan dengan cara library research, buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, dan website.

### **3.7 Metode Pengolahan Data/Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2014) Metode Pengolahan Data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain. Setelah data yang diperlukan terkumpul yang kemudian diolah dan dianalisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Package for The Social Sciences) berupa pengujian hipotesis yang menggunakan uji statistik. Metode yang digunakan adalah analisa data yaitu Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, dan Uji Hipotesis.

#### **3.7.1 Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau penjelasan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varians, maksimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2011)

#### **3.7.2 Uji Asumsi Klasik**

##### **3.7.2.1 Uji Normalitas**

Uji Normalitas dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah adakah suatu model regresi linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya akan mempunyai distribusi yang normak atau tidak. Cara untuk melihat normalitas adalah dengan cara melihat histogram yang memperlihatkan perbandingan antara data observasi dan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun jika hanya melihat histogram hal ini dapat menjerumuskan pada kesalahan khusus untuk sampel yang jumlahnya sedikit. Metode yang lebih tepat merupakan dengan perhitungan statistik. yang menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikan 5%, Jika nilai signifikan dari nilai Kolmogorov-Smirnov  $> 5\%$ , data yang digunakan normal (Ghozali, 2011)

##### **3.7.2.2 Uji Multikolonieritas**

Menurut Ghozali (2011), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi akan ditemukannya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya korelasi antara variabel independen (bebas). Cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dalam suatu model regresi dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan Variance Inflation Faktor (VIF), berikut ini untuk menuntukan ada atau tidaknya multikolonieritas yaitu dengan cara sebagai berikut :

- 1) Jika nilai  $VIF > 10$  atau jika nilai Tolerance  $< 10\%/0,10$  maka adanya multikolonieritas

- 2) Jika nilai VIF < 10 atau jika nilai Tolerance > 10%/0,10 maka tidak adanya multikolonieritas

### 3.7.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam suatu model regresi linier apakah ada atau tidak adanya korelasi antar kesalahan residual pada periode t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadinya korelasi, maka akan dinamakan ada masalah autokorelasi (Ghozali dan Ratmono, 2017). Model regresi seharusnya tidak terjadi korelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak ada masalah dalam autokorelasi. Metode pengujian uji Run Test yang merupakan bagian dari statistik non-parametrik dan dapat digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi tertinggi. Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara acak atau tidak, karena jika antar residual tidak adanya hubungan korelasi maka dapat dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Syarat tidak adanya korelasi di suatu model regresi linier apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka data residual terjadi secara acak (random) jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 maka data residual terjadi secara tidak acak (random).

### 3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan varians residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara untuk memprediksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot, regresi yang tidak terjadi heterostisitas menurut Sujarweni (2016):

- 1) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angkat 0
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
- 4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola

### 3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan model regresi yang dapat melibatkan lebih dari satu variabel independen. Menurut Ghozali (2018) menyatakan bahwa analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *multiple regression*, yaitu analisis dengan cara melihat pendapatan asli daerah dan Dana Transfer terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien Regresi
- X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X2 = Dana Transfer
- e = Error

### **3.7.4 Uji Hipotesis**

#### **3.7.4.1 Uji Statistik t**

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara persial akan berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen (Mulyono, 2018). Dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t-hitung pada masing-masing koefisien t regresi dengan t-tabel sesuai dengan tingkat signifikan yang digunakan (Duwi Priyatno, 2012). Derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai t-hitung yang terdapat dari hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari t-tabel maka, artinya ada pengaruh secara persial antara variabel independen dan dependen. Sebaliknya jika nilai t-hitung yang terdapat dari hasil pengolahan nilainya lebih kecil maka, artinya tidak pengaruh secara persial antara variabel independen dan dependen.

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria yaitu :

1. Jika nilai signifikasi  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, maka dapat disimpulkan adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikasi  $t > 0,05$  maka dapat disimpulkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

#### **3.7.4.2 Uji Statistik F**

Uji F bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel independen secara simultan dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Mulyono, 2018). Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05.

1. Jika nilai signifikasi  $\geq 0,05$ , maka dapat disimpulkan secara simultan variabel independen bukan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$ , maka dapat disimpulkan secara simultan variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

#### **3.7.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut Ghozali (2007), menyatakan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Apabila nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, maka semakin tinggi nilai koefisien determinasi yang dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians perubahan yang terdapat pada variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini memilih Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2016-2020 sebagai lokasi penelitian. Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi sampel dalam penelitian ini seperti yang sudah ditentukan dan dijelaskan di Bab III.

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Bogor**

Dari masa ke masa, Bogor telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. Dari sisi sejarah, Kabupaten Bogor adalah salah satu wilayah yang menjadi pusat kerajaan tertua di Indonesia. Dari Catatan dan Prasasti yang ditemukan di Tempura sungai Ciaruteun dengan sungai Cisadane, memperlihatkan bahwa setidaknya pada awal abad ke 5 M di wilayah ini telah ada sebuah bentuk pemerintahan. Sejarah lama Dinasti Sung mencatat tahun 430, 433, 434, 437, dan 452 Kerajaan Holotan mengirimkan utusannya ke Cina. Sejarawan Prof. Dr. Slamet Muljana dalam bukunya Dari Holotan ke Jayakarta menyimpulkan Holotan adalah transliterasi Cina dari kata Aruteun, dan kerajaan Aruteun adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Prasasti Ciaruteun merupakan bukti sejarah perpindahan kekuasaan dari kerajaan Aruteun ke kerajaan Tarumanagara dibawah Raja Purnawarman, sekitar paruh akhir abad ke-5.

Prasasti-prasasti lainnya peninggalan Purnawarman adalah prasasti Kebon Kopi di Kecamatan Cibungbulang, Prasasti Jambu di Bukit Koleangkak (Pasir Gintung, Kecamatan Leuwiliang), dan prasasti Lebak (di tengah sungai Cidanghiyang, Propinsi Banten). Pada abad ke 6 dan ke 7 Kerajaan Tarumanagara merupakan penguasa tunggal di wilayah Jawa Barat. Setelah Tarumanagara, pada abad-abad selanjutnya kerajaan terkenal yang pernah muncul di Tanah Pasundan (Jawa Barat) adalah Sunda, Pajajaran, Galuh, dan Kawali. Semuanya tak terlepas dari keberadaan wilayah Bogor dan sekitarnya. Sejarah awal mula berdirinya Kabupaten Bogor, ditetapkan tanggal 3 Juni yang diilhami dari tanggal pelantikan Raja Pajajaran yang terkenal yaitu Sri Baduga Maharaja yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1482 selama sembilan hari yang disebut dengan upacara “Kedabhakti”.

Nama Bogor menurut berbagai pendapat bahwa kata Bogor berasal dari kata “Buitenzorg” nama resmi dari Penjajah Belanda. Pendapat lain berasal dari kata “Bahai” yang berarti Sapi, yang kebetulan ada patung sapi di Kebun Raya Bogor. Sedangkan pendapat ketiga menyebutkan Bogor berasal dari kata “Bokor” yang berarti tunggul pohon enau (kawung). Dalam versi lain menyebutkan nama Bogor telah tampil dalam sebuah dokumen tanggal 7 April 1952, tertulis “Hoofd Van de Negorij Bogor” yang berarti kurang lebih Kepala Kampung Bogor, yang menurut informasi kemudian bahwa Kampung Bogor itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya Bogor yang mulai dibangun pada tahun 1817. Asal mula adanya masyarakat Kabupaten Bogor, cikal bakalnya adalah dari penggabungan sembilan Kelompok Pemukiman oleh Gubernur Jendral Baron Van Inhof pada tahun 1745, sehingga menjadi kesatuan masyarakat yang berkembang menjadi

besar di waktu kemudian. Kesatuan masyarakat itulah yang menjadi inti masyarakat Kabupaten Bogor.

Pusat Pemerintahan Bogor semula masih berada di wilayah Kota Bogor yaitu tepatnya di Panaragan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, Ibu Kota Kabupaten Bogor dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Sejak tahun 1990 pusat kegiatan pemerintahan menempati Kantor Pemerintahan di Cibinong.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Bogor**

1. Visi

Visi Kabupaten Bogor adalah “Mewujudkan Kabupaten Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”

2. Misi

- 1) Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
- 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- 3) Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan kesolehan sosial.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

#### **4.1.3 Geografis Kabupaten Bogor**

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas  $\pm 2.664 \text{ km}^2$ . Secara geografis terletak di antara  $6^{\circ}18'0'' - 6^{\circ}47'10''$  Lintang Selatan dan  $106^{\circ}23'45'' - 107^{\circ}13'30''$  Bujur Timur, dengan tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relative rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, dataran rendah sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl), merupakan kategori ekologi hilir. Dataran bergelombang sekitar 43,62% berada pada ketinggian 100 – 500 meter dpl, merupakan kategori ekologi tengah. Sekitar 19,53% daerah pegunungan berada pada ketinggian 500 - 1.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu. Daerah pegunungan tinggi sekitar 8,43% berada pada ketinggian 1.000 – 2.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000 – 2.500 meter dpl, merupakan kategori hulu.

Adapun Batas-batas wilayah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Lebak;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur;
- Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Bogor.

Selain itu, kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan penyusunnya didominasi oleh hasil

letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relative rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor. Secara klimatologi, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian Selatan dan iklim tropis basah di bagian Utara, dengan rata-rata curah tahunan 2.500 – 5.00 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20° - 30°C, dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 25°. Kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata-rata 1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata-rata sebesar 146,2 mm/bulan.

Sedangkan secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi kedalam 7 (tujuh) buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: (1) DAS Cidurian; (2) DAS Cimanceuri; (3) DAS Cisadane; (4) DAS Ciliwung; (5) Sub DAS Kali Bekasi; (6) Sub DAS Cipamingkis; dan (7) DAS Cibeeet. Selain itu juga terdapat 32 jaringan irigasi pemerintah, 794 jaringan irigasi pedesaan, 93 situ dan 96 mata air.

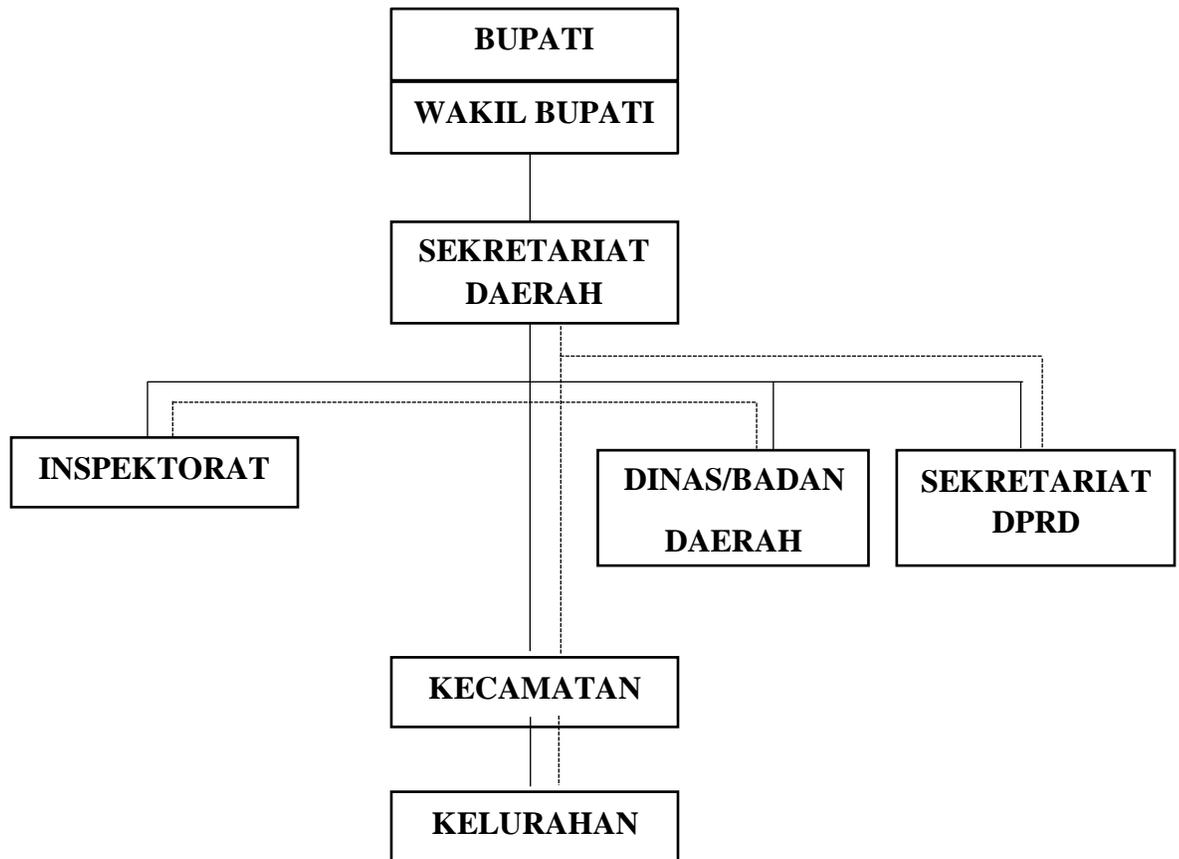
#### **4.1.4 Pemerintah Kabupaten**

Kabupaten Bogor secara administrasi terdiri dari 434 desa/kelurahan (417 desa dan 17 kelurahan), dengan jumlah 3.941 RW dan 15.874 RT yang tercakup dalam 40 kecamatan. Luas wilayah terbesar di kecamatan Cigudeg seluas 17.126,24 Ha, yang terdiri dari 15 desa dan luas terkecil adalah kecamatan Ciomas yang memiliki luas 1.810,36 Ha, yang terdiri 10 desa dan 1 kelurahan. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat 1 bahwa urusan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, wilayah ini meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan; pemanfaatan dana pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah social, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan, dan cacatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor

Gambar 4.1

Struktur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016



Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Bupati dan Wakil Bupati

Bupati Bogor mempunyai kewajiban :

- a) Mempertahankan dan menjaga ketentraman Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945,
- b) Memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
- c) Menghormati kedaulatan rakyat,
- d) Menegakkan seluruh peraturan perundangan,
- e) Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat,
- f) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan
- g) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan sebagai Peraturan Daerah bersama DPRD.

Wakil Bupati Bogor mempunyai kewajiban:

- a) Membantu Bupati Bogor dalam melaksanakan kewajibannya,
- b) Mengkoordinasikan kegiatan organisasi perangkat daerah/instansi pemerintah di daerah, dan
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bogor.

2. Sekretariat Daerah

Berdasarkan peraturan Bupati Bogor Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud diatas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah,
- b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah,
- d) Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong praja memiliki fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketertiban umum dan kentrman masyarakat serta perlindungan masyarakat,
- b) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat,
- c) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- d) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah,
- e) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat,
- f) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya,

- g) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau bahan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
  - h) Pengelolaan kesekretariatan Satuan, dan
  - i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.
4. Lembaga Teknis Daerah
- Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan daerah dibidangnya. Tugas melaksanakan tugas tertentu karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah bahwa Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
  - 3) Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
  - 4) Badan Lingkungan Hidup
  - 5) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
  - 6) Inspektorat Kabupaten
  - 7) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
  - 8) Kantor Penanaman Modal Daerah
  - 9) Kantor Arsip dan Perpustakaan
- Adapun fungsi dari Lembaga Teknis Daerah
- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya, dan
  - b) Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Daerah
- Dinas Daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas desentralisasi. Dalam penyelenggaraan tugas pokok, Dinas Daerah mempunyai fungsi yaitu :
- a) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya.
  - b) Pemberian izin dan pelaksanaan layanan umum
  - c) Pembinaan terhadap Teknis Dinas dan Cabang Dinas
6. Kecamatan
- Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan menyatakan bahwa kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakatdesa dan/atau kelurahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang. Dalam melaksanakan tugasnya kecamatan mempunyai fungsi :
- a) Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan,
  - b) Pengekoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,

- c) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- d) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- e) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana peyanan umum,
- f) Pegoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan,
- g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan,
- h) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unsur Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan,
- i) Pelaksanaan administrasi Kecamatan, dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

#### 7. Kelurahan/Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Kelurahan bahwa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam penyelenggaraan tugas kelurahan/desa mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan,
- b) Pemberdayaan masyarakat,
- c) Pelayanan masyarakat,
- d) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- e) Penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan,
- f) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
- g) Pembinaan lembaga kemasyarakatan, dan
- h) Penyelenggaraan ketatausahaan.

#### **4.1.5 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Bogor**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Data dan Informasi mengenai penelitian ini sebagai berikut.

##### **4.1.5.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Oleh karena itu seiringnya dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Pendapatan Asli Daerah diupayakan untuk meningkat. Bagi Pemerintah Daerah secara umum, besarnya terhadap kontribusi pada pajak daerah dan

retribusi daerah terhadap APBN sangat berinovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Tabel 4.1  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor  
Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Daerah	1.520.926.774.870	1.786.132.725.164	1.969.519.761.542	2.243.429.745.163	1.857.411.776.716
Retribusi Daerah	136.756.227.055	150.541.572.101	112.776.035.992	141.468.140.179	128.914.969.533
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.075.638.051	44.338.643.608	44.287.173.198	57.537.749.304	67.102.677.276
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	591.417.034.817	1.060.859.507.031	668.077.769.419	718.730.280.852	756.725.928.757
Jumlah PAD	2.292.175.674.801	3.041.872.447.905	2.794.660.740.152	3.161.165.915.498	2.810.155.352.282

Sumber : [www.bogorkab.go.id](http://www.bogorkab.go.id) (data diolah, 2022)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Perperti dari tahun 2016-2017 mengalami kenaikan dari 2.292.175.674.801 menjadi 3.041.872.447.905 dan kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2.794.660.740.152. pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 3.161.165.915.498, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2.810.155.352.282. Perolehan Pendapatan Asli Daerah tertinggi didapatkan dari hasil pajak daerah dan yang terendah didapatkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk melihat data perkembangan PAD dihitung menggunakan Rasio Efektivitas, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Perkembangan PAD Kabupaten Bogor  
Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas	Kemampuan Keuangan
2016	2.292.175.674.801	2.065.822.879.000	110,96%	Sangat Efektif
2017	3.041.872.447.905	2.282.578.507.000	133,26%	Sangat Efektif
2018	2.794.660.740.152	2.475.535.726.000	112,89%	Sangat Efektif
2019	3.161.165.915.498	2.676.364.947.000	118,11%	Sangat Efektif
2020	2.810.155.352.282	2.462.621.761.551	114,11%	Sangat Efektif

Sumber : [www.bogorkab.go.id](http://www.bogorkab.go.id) (data diolah, 2022)

Ket :

- Sangat Efektif : >100%
- Efektif : 100%
- Cukup Efektif : 90% - 99%
- Kurang Efektif : 75% - 89%
- Tidak Efektif : <75%

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa PAD Kabupaten Bogor pada tahun 2016-2020 setiap tahunnya ada perkembangan PAD mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 sebesar 101,95% yang kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 133,26%. Pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 112,89%. Tahun 2019 menaik menjadi 118,11% dan tahun 2020 menurun menjadi 114,11%. Dapat disimpulkan kenaikan PAD terbesar adalah pada tahun 2017 yaitu mencapai 133,26%, dan nilai PAD terkecil adalah tahun 2016 yang mencapai 101,95%. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah sudah memenuhi target Pendapatan Asli Daerah dan lebih ditingkatkan lagi Pendapatan Asli Daerah.

#### 4.1.5.2 Dana Transfer Kabupaten Bogor

Dana Transfer/Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut (Darise, 2008) Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi ekonomi daerah. Dana Transfer akan dialokasikan untuk kebutuhan daerah yang dananya telah disesuaikan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Tabel 4.3  
Dana Transfer Kabupaten Bogor  
Tahun Anggaran 2016-2020

<b>Dana Transfer</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
DBH	267.917.072.219	269.361.187.649	262.173.257.226	315.087.463.197	248.356.815.110
DAU	1.917.780.234.000	1.902.004.175.000	1.919.023.527.000	2.034.853.421.000	1.849.796.843.000
DAK	506.469.716.920	571.474.008.174.	637.617.713.872	744.504.933.102	727.777.631.873
<b>Jumlah Dana Transfer</b>	<b>2.692.167.023.139</b>	<b>2.742.839.370.823</b>	<b>2.818.814.498.138</b>	<b>3.094.445.817.299</b>	<b>2.825.931.289.983</b>

Sumber : [www.bogorkab.go.id](http://www.bogorkab.go.id) (data diolah, 2022)

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa Dana Transfer Kabupaten Bogor dalam waktu 2016-2019 dapat dilihat setiap tahunnya meningkat akan tetapi pada tahun 2020 terjadinya penurunan. Dan dapat dilihat Dana Transfer tertinggi didapatkan dari Dana Alokasi Umum dan yang paling rendah dari Dana Bagi Hasil. Untuk melihat data kenaikan Dana Transfer dihitung menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Perhitungan rasio tersebut dapat memperoleh hasil rasio ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten bogor sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Hasil Pengukuran Dana Transfer Kabupaten Bogor  
Tahun Anggaran 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>Dana Transfer</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>Rasio Ketergantungan</b>	<b>Kriteria</b>
2016	2.692.167.023.139	5.973.280.685.746	45,07%	Baik
2017	2.742.839.370.823	6.975.053.078.040	39,32%	Baik
2018	2.818.814.498.138	7.300.485.379.647	38,61%	Baik
2019	3.094.455.817.299	8.137.989.873.806	38,02%	Baik
2020	2.825.931.289.983	7.687.179.717.004	36,76%	Baik

Sumber : [www.bogorkab.go.id](http://www.bogorkab.go.id) (data diolah, 2022)

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa Dana Transfer Kabupaten Bogor pada tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Semakin tinggi rasio

ketergantungan maka semakin tinggi juga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pada tahun 2016 hasil Rasio Ketergantungan yaitu sebesar 45,07% yang pada tahun berikutnya pada tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 39,32%. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 38,61%, kemudian tahun 2019 mengalami kenaikan Rasio Ketergantungan mencapai nilai 38,02%, hingga pada tahun 2020 penurunan mencapai angka nilai sebesar 36,76%. Dari hitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang berada diangka 45,07% dan nilai ketergantungan terendah terjadi ditahun 2020 berada diangka 36,76%. Hal Ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat berada ditingkat yang “Baik” yang artinya pemerintah Daerah Kabupaten Bogor masih bergantung pada bantuan Pemerintah Pusat, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah yang menurun.

#### **4.1.5.3 Kinerja Keuangan Kabupaten Bogor**

Menurut Halim (2004) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kinerja Keuangan Daerah dapat diukur menggunakan Rasio Kemandirian karena dapat menunjukkan berapa besarnya suatu daerah dapat mendanai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan pada daerah. Semakin besar nilai Rasio maka semakin besar tingkat kemandirian suatu daerah.

Berdasarkan perhitungan tersebut maka akan diperoleh hasil Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah dengan Menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sebagai berikut ini :

Tabel 4.5  
 Hasil Pengukuran Kinerja Keuangan  
 Pemerintah kabupaten Bogor  
 Tahun Anggaran 2016-2020

(Rupiah)

Tahun	PAD	Transfer Pusat Dana Transfer (DBH, DAU, DAK)	Transfer Pusat Dana Lainnya	Transfer Provinsi	Jumlah Tranfer pusat dan Provinsi	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2016	2.292.175.674	2.692.167.023	326.384.354	577.023.348	3.595.574.725	63,74%	Partisipatif
2017	3.041.872.447	2.742.839.370	379.499.169	659.561.474	3.781.900.013	80,43%	Delegatif
2018	2.794.660.740	2.818.814.498	419.568.048	822.244.233	4.060.626.799	68,82%	Partisipatif
2019	3.161.165.915	3.094.445.817	513.482.851	888.744.027	4.496.672.695	70,30%	Partisipatif
2020	2.810.155.352	2.825.931.289	574.120.558	726.326.745	4.126.378.592	68,10%	Partisipatif

Sumber : [www.bogorkab.go.id](http://www.bogorkab.go.id) (data diolah, 2022)

Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2016-2020 mengalami Fluktuasi. Ketika Rasio Kemandirian semakin tinggi maka semakin tinggi juga kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya begitu sebaliknya ketika Rasio Kemandirian rendah maka kemandirian daerah tersebut menurun dalam mengelola daerahnya. Pada tahun 2016 hasil Rasio Kemandirian mencapai sebesar 63,74%, kemudian pada tahun 2017 mencapai sebesar 80,43% pada tahun ini rasio kemandirian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun selanjutnya Rasio Kemandirian mengalami penurunan tahun 2018 hasil Rasio Kemandirian mencapai sebesar 68,82%. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan Rasio Kemandirian mencapai sebesar 70,30%. Pada tahun 2020 hasil Rasio Kemandirian mengalami penurunan hingga mencapai sebesar 68,10%. Dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa nilai kemandirian tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan hasil sebesar 80,43% dan nilai kemandirian yang tersendah pada tahun 2016 yaitu mencapai angka 63,74%.

Berikut ini ukuran atau pola hubungan dan tingkat kemandirian keuangan daerah dengan pola hubungan setelah perhitungan kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.6  
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Berdasarkan dengan pola hubungan dan tingkat kemandirian keuangan daerah dalam tabel 4.6, dapat dilihat bahwa bahwa kemandirian daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2016-2020 disimpulkan bahwa sebagai berikut :

- Tahun 2016, 2018, 2019 dan 2020, nilai kemandirian daerah Kabupaten Bogor sebesar 63,74%, 68,82%, 70,30% dan 68,10% dapat disimpulkan masuk kedalam pola hubungan Partisipatif (Sedang), yang berarti peranan pemerintah pusat berkurang dikarenakan daerah tersebut mendekati mampu menjalankan atau melaksanakan otonomi daerahnya sendiri.
- Tahun 2017, nilai kemandirian daerah Kabupaten Bogor mencapai angka sebesar 80,43% yang dapat disimpulkan masuk kedalam pola hubungan Delegatif (Tinggi), yang berarti peran pemerintah pusat semakin berkurang atau bahkan sudah tidak ada, karena daerah tersebut dapat dianggap sudah mampu melaksanakan urusan otonomi daerahnya sendiri.

## 4.2 Analisis Data

Dilakukannya analisis data yang terdiri dari analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, dan Uji Hipotesis. Pengujian Statistik pada Penelitian ini menggunakan Aplikasi SPSS 26.

### 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis dilakukan untuk memberikan gambaran atau penjelasan suatu data dengan membandingkan nilai rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum Tabel berikut ini adalah statistik deskriptif, variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer dan variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Daerah:

Tabel 4.7  
Analisis Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	5	11096.00	13326.00	11786.6000	899.43832
Dana Transfer	5	3676.00	4507.00	3955.6000	322.22554
Kinerja Keuangan	5	6375.00	8043.00	7028.0000	617.55121
Valid N (listwise)	5				

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Dalam tabel 4.7 memperlihatkan bahwa jumlah data yang ada dalam penelitian ini adalah 5 sampel (N). Berdasarkan perhitungan selama periode 2016-2020, variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu PAD sebagai  $X_1$  dan Dana Transfer sebagai  $X_2$ , variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kinerja Keuangan sebagai Y. Dari 5 data PAD, nilai yang terendah/minimum sebesar 11096.00, yang tertinggi/maximum sebesar 13326.00 dan sedangkan nilai rata-rata/mean sebesar 11786.6000 dengan standar deviasi 899.43832.

Kemudian 5 data Dana Transfer, nilai terendah/ minimum sebesar 3676.00, nilai tertinggi.maximum sebesar 4507.00 dan nilai rata-rata/mean sebesar 3955.0000 dengan standar deviasi sebesar 322.22554.

Sedangkan 5 data kinerja keuangan, nilai terendah/minimum sebesar 6375.00, nilai tertinggi/maximum sebesar 8043.00 dan nilai rata-rata/mean sebesar 7028.0000 dengan standar deviasi 627.55121.

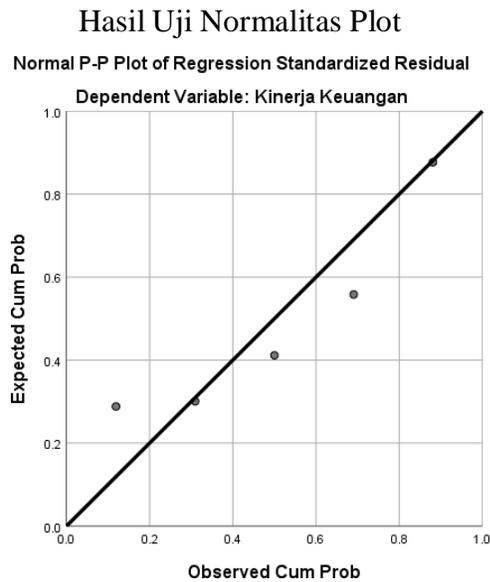
#### 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian Analisis Regresi Linier Berganda terdapat Asumsi Klasik yang harus dipenuhi terdahulu yang berguna untuk apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Ada empat uji yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heterokedastisitas dan Uji Autokorelasi. Berikut ini hasil uji Asumsi Klasik sebagai berikut:

#### 4.2.2.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah plot dan One-Sample Kolmogorov Smirnov. Berikut adalah hasil uji penelitian:

Gambar 4.2



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa model regresi berdistribusi normal, karena tanda titik-titik yang tersebar disekitaran arah garis diagonal dan menyebar mengikuti garis diagonal.

Tabel 4.8

Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov Smirnov***One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	86.99951932
Most Extreme Differences	Absolute	.224
	Positive	.224
	Negative	-.215
Test Statistic		.224
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Dari tabel diatas merupakan output dari pengolahan data yang diuji untuk uji normalitas dengan one-sample Kolmogorov smirnov, dapat dilihat bahwa hasil nilai signifikansi sebesar 0,200. Dengan hasil signifikansi lebih dari 0,05 ( $0,200 > 0,05$ ), maka nilai residual dari uji tersebut adalah normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**4.2.2.2 Uji Multikolonieritas**

Model Regresi bebas dari multikolonieritas jika nilai Tolerance lebih dari 10 persen (0,1) dan nilai VIF kurang dari 10. Berikut ini adalah hasil pengujian dari uji multikolonieritas sebagai berikut:

Tabel 4.9  
Hasil Uji Multikolonieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Coefficients	Tolerance	VIF	
			Beta			
1	(Constant)	757.024	1261.301			
	PAD	.643	.070	.936	.946	1.057
	Dana Transfer	-.329	.196	-.172	.946	1.057

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF menunjukkan nilai PAD dan Dana Transfer masing-masing sebesar 1,057 dan nilai tolerance masing-masing menunjukkan nilai sebesar 0,946. Nilai VIF variabel independen tersebut yaitu kurang dari 10 ( $1,057 < 10$ ) dan nilai tolerance lebih dari 0,1 ( $0,946 > 0,1$ ). Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukannya adanya masalah multikolonieritas pada antar variabel bebas.

**4.2.2.3 Uji Autokorelasi**

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengujian metode Runs Test. Berikut ini hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4.10  
Hasil Uji Autokorelasi

**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-27.53776
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	2
Z	-.982
Asymp. Sig. (2-tailed)	.326

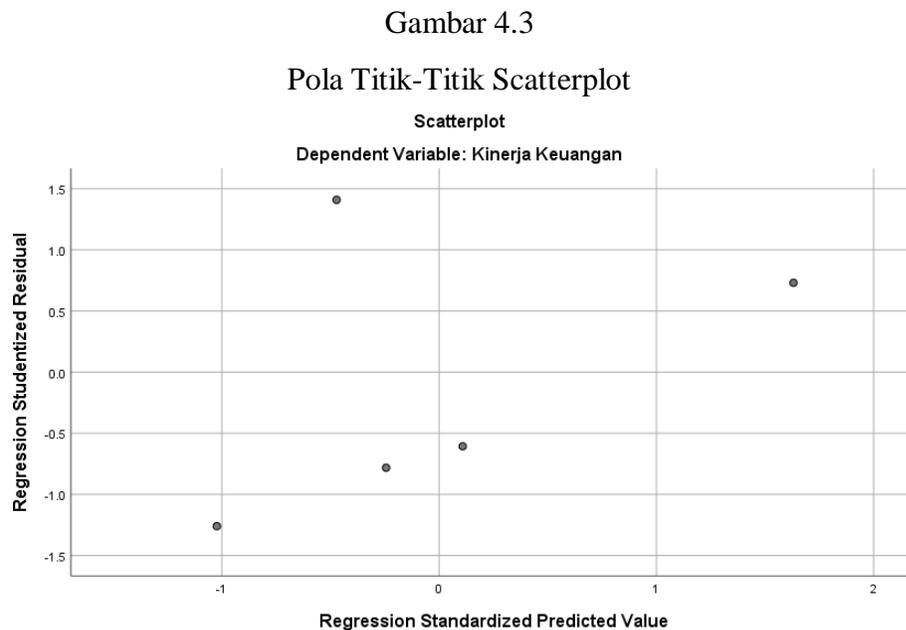
a. Median

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Dari hasil uji autokorelasi diatas dengan metode Run Test menunjukkan nilai sebesar 0,326 yang artinya lebih besar dari 0,05 ( $0,326 > 0,05$ ), dapat disimpulkan bahwa tidak adanya masalah autokorelasi dalam data tersebut.

#### 4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot*. Berikut ini adalah hasil pengolahan data menggunakan grafik *scatterplot* sebagai berikut:



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa tanda titik-titik tidak membentuk sebuah pola yang jelas. Titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa dalam uji ini tidak adanya masalah heteroskedastisitas.

#### 4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Uji Regresi Linier Berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa pengaruhnya dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini PAD dan Dana Transfer Sebagai Variabel Independen dan Kinerja Keuangan Pemerintah sebagai Variabel Dependen. Untuk melakukan Regresi Linier Berganda maka terdapat asumsi klasik yang harus dipenuhi terdahulu seperti uji asumsi klasik yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini seperti : adanya nilai residual yang berdistribusi normal, tidak adanya multikolonieritas, tidak adanya heterosdastisitas dan tidak adanya

autokorelasi. Model persamaan regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Dana Transfer

e = Error

Hasil dari uji koefisien regresi linier berganda pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.11  
Uji Koefisien Regresi Linier Berganda  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	757.024	1261.301		.600	.609		
PAD	.643	.070	.936	9.139	.012	.946	1.057
Dana Transfer	-.329	.196	-.172	-1.679	.235	.946	1.057

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada kolom Unstandardized Coefficients (B). persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 757.024 + 0.643 - 0.329$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

- 1) Nilai Konstanta sebesar 757.024, artinya apabila semua variabel independen yaitu PAD dan Dana Transfer bernilai 0, maka nilai konstanta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai 757.024.
- 2) Koefisien regresi variabel independen Pendapatan Asli Daerah bernilai positif sebesar 0.643, maka dapat diartikan bahwa hal ini menunjukkan tingkat PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan kenaikan PAD

sebesar satu persen dengan asumsi variabel lain bernilai tetap, maka Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0.643.

- 3) Kefisien regresi variabel independen Dana Transfer bernilai sebesar -0.329, maka dapat diartikan bahwa hal ini menunjukkan setiap kenaikan Dana Transfer sebesar satu persen akan diikuti penurunan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar -0.329 dengan asumsi nilai variabel lain tetap.

#### 4.2.4 Uji Hipotesis

##### 4.2.4.1 Uji Statistik t

Uji Statistik t dilakukan untuk menunjukkan pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen secara persial. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05 dibagi dua menjadi 0,025. Jika hasil nilai signifikan  $< 0,05$  dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka variabel independen memiliki pengaruh secara persial terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil pengujian data sebagai berikut :

Tabel 4.12  
Hasil Uji Statistik t Persial  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	757.024	1261.301		.600	.609
PAD	.643	.070	.936	9.139	.012
Dana Transfer	-.329	.196	-.172	-1.679	.235

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Berdasarkan data yang diatas pada tabel, hasil uji signifikan parameter individual (Uji Statistik t), sebagai berikut :

- a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan signifikan, jika signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima, sebaliknya jika signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Dari hasil tabel dapat dilihat nilai signifikan PAD sebesar 0.012 dan  $t_{hitung}$  sebesar 9.139. Dapat diartikan signifikan pada uji t lebih kecil dari 0,05 ( $0,012 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $9.139 > 4.30265$ ) yang artinya  $H_0$

diterima dan  $H_a$  diterima, dapat disimpulkan bahwa PAD secara persial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.  $H_1$  Diterima.

b. Dana Transfer terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan signifikan, jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima, sebaliknya jika signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Dari hasil tabel dapat dilihat nilai signifikan Dana Transfer sebesar 0.235 dan  $t_{hitung}$  sebesar -1.679. dapat diartikan signifikan pada uji t lebih besar dari 0,05 ( $0,235 > 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-1.679 < 4.30265$ ) maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di tolak. Maka dapat disimpulkan bahwa secara persial Dana Transfer tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.  $H_2$  ditolak.

**4.2.4.2 Uji Statistik F**

Uji Statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah Variabel Independen secara bersamaan berpengaruh terhadap Variabel Dependen secara simultan. Dalam pengujian ini jika nilai signifikan 0,05 dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil pengujian data sebagai berikut:

Tabel 4.13

Hasil Uji Statistik F Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1495202.335	2	747601.167	49.386	.020 <sup>b</sup>
	Residual	30275.665	2	15137.833		
	Total	1525478.000	4			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), Dana Transfer, PAD

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan regresi dengan nilai  $f_{hitung}$  sebesar 49.386 dengan taraf signifikan sebesar 0.020, sedangkan nilai  $f_{tabel}$  19.00. Maka dapat disimpulkan bahwa  $f_{hitung} > f_{tabel}$  ( $49.386 > 19.00$ ) yang artinya PAD dan Dana Transfer secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga  $H_3$  diterima.

#### 4.2.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan Variabel Independen dalam menerapkan Variabel Dependen. Nilai koefisien Determinasi antara nol sampai dengan satu, jika nilai  $R^2$  kecil maka kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen terbatas. Berikut ini hasil pengujian data sebagai berikut :

Tabel 4.14  
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.990 <sup>a</sup>	.980	.960	123.03590

a. Predictors: (Constant), Dana Transfer, PAD

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2022)

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan riskasan model yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi (R Square), koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R Square) dan ukuran kesalahan prediksi (Std Error of the Estimate). Nilai koefisien deterninasi R Square ( $R^2$ ) atau kuadrat dari R adalah sebesar 0.980 atau 98%. Yang artinya hal ini dapat menunjukkan bahwa variasi dari kinerja Keuangan dapat dijelaskan oleh PAD dan Dana Transfer. Sedangkan sisanya yakni 2% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak dimaksukan kedalam penelitian ini.

### 4.3 Pembahasan Dan Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Analisis pengaruh PAD dan Dana Transfer terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dapat dilakukan interpretasi sebagai berikut :

#### 4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui adanya pengaruh secara persial antara variabel indpenden dengan variabel dependen menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor. Hal ini di buktikan dengan hasil uji t yang telah dilakukan oleh penulis yang menunjukkan hasil signifikan sebesar 0,012 yang artinya kurang dari 0,05, dengan memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 9,139 dan  $t_{tabel}$

memiliki nilai 4.30265. hal ini dapat menunjukkan bahwa PAD memberikan kontribusi dalam peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Tri Yuni Pratiwi (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif signifikansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.

Pendapatan Asli daerah sebagai sumber pendapatan bersih yang berhak diakui oleh pemerintah daerah dimana pemerintah daerah memiliki wewenang dan kebebasan dalam mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Semakin tinggi penerimaan PAD maka semakin tinggi pula kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan optimalisasi potensi sumber pendapatan sehingga akan berdampak baik pada Kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang dicapai dan tingkat kemandirian sangat tinggi.

#### **4.3.2 Pengaruh Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bogor**

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Transfer tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dilihat dari hasil uji t yang telah dilakukan oleh penulis yang menunjukkan hasil signifikan sebesar 0,235 yang artinya lebih besar dari 0,05, dengan memiliki  $t_{hitung}$  -1.679 dan  $t_{tabel}$  sebesar 4.30265. hal ini menunjukkan bahwa Dana Transfer tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Swastika Enjang Prasasti (2013) yang berpendapat bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Akan tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian Ester Trivona Nauw yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintahan keuangan.

Tidak berpengaruhnya Dana Transfer dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah belum mampu mengelola keuangannya secara optimal dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat. Dana Transfer diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan digunakan untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan otonomi daerah. Dapat disimpulkan semakin besar perolehan Dana Transfer yang diterima maka tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah semakin rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya..

#### **4.3.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bogor**

Berdasarkan hasil pengujian uji F secara simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,020 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dengan  $F_{hitung} 49,386 > F_{tabel} 19,00$ .

Hasil penelitian ini secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dan Dana Transfer Dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Julitawati (2012) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016-2020. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016-2020. Hal ini menunjukkan PAD memiliki nilai signifikan 0.012 yang artinya kurang dari 0,05. Hasil pengujian ini dengan membandingkan antara  $t_{hitung}$  ( $0,025 : n - k - 1$ ) dengan  $t_{tabel}$ , nilai  $t_{tabel}$  ( $0,025 : 2$ ) sama dengan 4.30265 sedangkan  $t_{hitung}$  adalah 9.139, maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $9.139 > 4.30265$ ). Dapat disimpulkan bahwa PAD secara Parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Dana Transfer tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Transfer memiliki nilai signifikan sebesar 0.235 yang artinya lebih dari 0,05. Hasil pengujian ini dengan membandingkan antara  $t_{hitung}$  ( $0,025 : n - k - 1$ ) dengan  $t_{tabel}$ , nilai  $t_{tabel}$  ( $0,025 : 2$ ) sama dengan 4.30265. Sedangkan  $t_{hitung}$  adalah -1.679, maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-1.679 < 4.30265$ ). Dapat disimpulkan bahwa secara parsial Dana Transfer tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  $f_{tabel}$  sebesar 19.00 dan hasil yang diperoleh nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  ( $49.386 > 19.00$ ) yang artinya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, berikut ini saran yang sehubungan dengan permasalahan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor
  - a. Pemerintah daerah sebagai yang berwenang dalam mengelola keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan kembali pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dan meminimalkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah Kabupaten Bogor mampu memdanai dan meningkatkan
  - b. Mengingat Dana Transfer yang cukup meningkat pemerintahan daerah perlu mengoptimalkan penggunaan Dana Transfer dengan meningkatkan kualitas sarana

dan prasarana secara integritas dan meningkatkan pelayanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerahnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel independen yang lain seperti belanja modal dan penerimaan pendapatan pemerintah daerah lainnya untuk dikembangkan lagi dan menggunakan rasio lain seperti rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan untuk mengukur kinerja keuangan daerah.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan satu daerah saja seperti Kabupaten Bogor tetapi bisa menjadi satu provinsi seperti provinsi Jawa Barat atau Provinsi lainnya ada 38 Provinsi agar lebih jelas dalam perbandingan daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Tri Yuni Pratiwi. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>
- Wahyuningsih, Y. E. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.
- Mahmudi (2011), Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta
- Mohamad Mahsun, Fima sulistyowati, Heribertus Andre Purwanugraha (2007). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, BPFY Yogyakarta.
- Budianto, S. W. A. (2016). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. 4.
- Indriani Putri Ekasuryana. (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2011-2016, Bogor, Universitas Pakuan Bogor.
- Nugroho, P. (2017). Analisis Atas Kemandirian Pemda Dalam Mengelola Keuangannya. *Info Artha*, 5, 93–106. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.64>
- Ramadhani, F. R. (2020). Ratio of Independency, Ratio of Effectiveness, Trend of Independency, and Trend of Effectiveness. *Ekonomi Pembangunan*, 14. <https://media.neliti.com/media/publications/90744-ID-analisis-kemandirian-dan-efektivitas-keu.pdf>
- Arifin, A. (2004). Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2016. 32, 1–41.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Achmad Fauzi, Nuramalia Hasanah (2015). Akuntansi Pemerintah, Jakarta, Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.
- Putu, N., Sukma, G., Bagus, I., & Sedana, P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 1080–1110. doi: <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i02.p19>
- Handayani, O. M., Sari, R. K., & Sulistyowati, A. (2013). Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan. 23–30.
- Darma, U. B., Jaya, A. K., Darma, U. B., Puspanita, I., Darma, U. B., & Darma, U. B. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan. 19(1), 21–37.
- Toto Suwarsa, T. I. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016-2018. *Jurnal Akuntansi*.
- Swastika Enjang Prasasti. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY Tahun 2007-2013). 1–13.
- Awwaliyah, N. F. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2017). Skripsi.
- Nauw, E. T. (2021). Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.
- Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *Journal Of Management*, 3(1), 679–692.
- Pratiwi, T. Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018.
- Febriyansah, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung. Politeknik Negeri Sriwijaya.  
<http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/7165>

Cok Istri Nilam K. N. & Ni Luh S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Undayana, Indonesia.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Euis Tilis Tianawati  
Alamat : Kp. Pojok Muara Rt05/Rw06 Desa Lulut Kecamatan  
Klapanunggal Kabupaten Bogor  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 11 Juni 1999  
Agama : Islam  
Pendidikan

- SD : SD Lulut 04
- SMP : SMP Yayasan Pendidikan Nurul Iman
- SMK : SMK PGRI 2 Cibinong

Bogor, September 2022  
Peneliti

(Euis Tilis Tianawati)

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN BOGOR Tahun 2016-2020

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5,973,280,685,746.00</b>	<b>6,975,053,078,040.35</b>	<b>7,300,485,379,647.18</b>	<b>8,137,989,873,806.00</b>	<b>7,687,179,717,004.00</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2,292,175,674,801.00</b>	<b>3,041,872,447,905.35</b>	<b>2,794,660,740,152.18</b>	<b>3,161,165,915,498.00</b>	<b>2,810,155,352,282.00</b>
Hasil Pajak Daerah	1,520,926,774,877.53	1,786,132,725,164.86	1,969,519,761,542.25	2,243,429,745,163.00	1,857,411,776,716.00
Hasil Retribusi Daerah	136,756,227,055.00	150,541,572,101.00	112,776,035,992.00	141,468,140,179.00	128,914,969,533.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43,075,638,051.00	44,338,643,608.00	44,287,173,198.00	57,537,749,304.00	67,102,677,276.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	591,417,034,817.47	1,060,859,507,031.49	668,077,769,419.93	718,730,280,852.00	756,725,928,757.00
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2,692,167,023,139.00</b>	<b>2,742,839,370,823.00</b>	<b>2,818,814,498,138.00</b>	<b>3,094,445,817,299.00</b>	<b>2,825,931,289,983.00</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	267,917,072,219.00	269,361,187,649.00	262,173,257,266.00	315,087,463,197.00	248,356,815,110.00
Dana Alokasi Umum	1,917,780,234,000.00	1,902,004,175,000.00	1,919,023,527,000.00	2,034,853,421,000.00	1,849,796,843,000.00
Dana Alokasi Khusus	506,469,716,920.00	571,474,008,174.00	637,617,713,872.00	744,504,933,102.00	727,777,631,873.00
<b>Tranfer Pemerintah Pusat - Dana Lainnya</b>	<b>326,384,354,000.00</b>	<b>379,499,169,989.00</b>	<b>419,568,048,852.00</b>	<b>513,482,851,602.00</b>	<b>574,120,558,252.00</b>
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	326,384,354,000.00	379,499,169,989.00	419,568,048,852.00	513,482,851,602.00	574,120,558,252.00
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>577,023,348,996.00</b>	<b>659,561,474,226.00</b>	<b>707,218,738,134.00</b>	<b>773,953,465,729.00</b>	<b>726,326,745,171.00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	577,023,348,996.00	659,561,474,226.00	707,218,738,134.00	773,953,465,729.00	726,326,745,171.00
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>85,530,284,810.00</b>	<b>151,280,615,097.00</b>	<b>560,223,354,371.00</b>	<b>594,941,823,678.00</b>	<b>750,645,771,316.00</b>
Pendapatan Hibah	2,943,000,000.00	5,498,942,371.00	445,197,858,747.00	459,978,600,000.00	585,034,080,000.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	82,587,284,810.00	145,781,672,726.00	115,025,495,624.00	114,790,561,426.00	153,891,135,003.00
Bonus Produksi	-	-	-	20,172,662,252.00	11,720,556,313.00

Lampiran 2 : Tabel t

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Lampiran 3 : Tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05															
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Lampiran : Bukti Lembar Pengesahan Sudah Di Tanda Tangan oleh Bapak Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE., CFrA., CA., QIA., CGCAE., ASEAN CPA., CIAE. Dan Bapak Sigit Edy Surono, Drs., MM.

